

Peran Kader Masyarakat Tertib dalam Implementasi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Kemandren Wirobrajan Kota Yogyakarta

Fuad Uli Addien¹, Supardal²

¹ Kemandren Wirobrajan, Jl. Bugisan Gang Dorodasih No. 16, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta 55251, Indonesia

² STPMD "APMD" Yogyakarta, Jl. Timoho No.317, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta 55225, Indonesia

Email: fuad.addien@gmail.com¹, gusdal66@gmail.com²

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.631>

Article Info

Received:

2025-05-27

Revised:

2025-06-18

Accepted:

2025-06-28

Abstrak: Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) merupakan strategi pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap administrasi kependudukan. Salah satu kebijakan strategis Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk menyukseskan GISA yaitu melalui keterlibatan dan partisipasi masyarakat dengan membentuk kader-kader di setiap kelurahan yang disebut Kader Masyarakat Tertib (Dermatib) GISA. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan GISA melalui peran Dermatib di Kemandren Wirobrajan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa data Tematik yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kata-kata kunci, merumuskan kategori data hingga muncul tema-tema dalam suatu fenomena. Hasil menunjukkan bahwa implementasi kebijakan GISA berjalan dengan baik dan Dermatib GISA berperan sesuai tugas dan fungsinya. Namun demikian, pelaksanaan tugas masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan utama yang ditemukan meliputi ketidaklengkapan data pemohon, keterbatasan fasilitas operasional, minimnya pelatihan teknis, keterbatasan kemampuan teknologi, rendahnya insentif, serta perangkapan jabatan. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III, kelemahan paling mencolok terdapat pada aspek sumber daya dan disposisi pelaksana.

Keyword: GISA, administrasi kependudukan, kader, implementasi kebijakan

PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan (Adminduk) merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan yang hasilnya nanti untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (1). Administrasi kependudukan merupakan fondasi penting dalam pembangunan nasional, karena data kependudukan menjadi dasar bagi perencanaan dan pelayanan publik. Jenis-jenis administrasi kependudukan meliputi informasi mengenai usia, jenis kelamin, agama, kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, dan hal-hal terkait lainnya.

Hingga saat ini, masalah terkait administrasi kependudukan masih sering ditemukan. Beberapa isu yang masih sering muncul dalam hal ini antara lain kesulitan masyarakat dalam mengurus dokumen

kependudukan, adanya keterlambatan dalam proses pengurusan dokumen, serta praktik pungutan liar yang masih terjadi dalam proses administrasi kependudukan (2).

Masalah dalam administrasi kependudukan ini seringkali menjadi lebih jelas saat pelaksanaan pemilu, baik tingkat nasional maupun pemilihan kepala daerah. Banyak warga yang mengeluhkan ketidakmampuan mereka untuk memakai hak suaranya dalam pemilu. Jika ditelusuri lebih jauh, yang menjadi penyebab utama lemahnya administrasi kependudukan ini karena kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi sangat rendah (3).

Salah satu upaya memperbaiki tertib administrasi dan kepemilikan dokumen kependudukan, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri meluncurkan kebijakan yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tanggal 7 Februari 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan, mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, serta membangun negara yang lebih kompetitif.

Salah satu kebijakan strategis Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk menyukkseskan GISA yaitu melalui keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat dengan membentuk kader-kader di setiap kelurahan sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

Menurut Narwoko (2011), kader adalah individu yang memiliki peran sentral dalam menjalankan program-program sosial dan pemerintahan di tingkat lokal. Kader berfungsi sebagai penggerak perubahan yang mampu memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan program, kader diharapkan tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai motivator dan fasilitator yang dapat meredakan hambatan-hambatan yang ada di masyarakat. Dalam pelaksanaan program pembangunan atau gerakan sosial, kader memiliki peran yang sangat strategis dalam menghubungkan masyarakat dengan berbagai program atau kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah. Peran kader tidak hanya terbatas pada sosialisasi, namun juga dalam pemberian informasi yang jelas, pembinaan, serta memberikan contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku. Kader merupakan tenaga masyarakat yang dianggap paling dekat dengan masyarakat (4).

Pembentukan kader dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Nomor : 1/DKPS/I/2025 Tentang Pembentukan Kader Masyarakat Tertib Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (Dermatib GISA) Kota Yogyakarta Tahun 2025. Kader-kader ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai contoh dan pelopor dalam kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah Kampung, sebagai pendorong masyarakat mewujudkan tertib kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sebagai penggerak masyarakat untuk mewujudkan tertib adminduk dan menyukkseskan GISA di Kota Yogyakarta, serta sebagai pelapor dalam pengurusan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Kemantren Wirobrajan adalah salah satu dari 14 kemantren yang berada di Kota Yogyakarta. Kemantren Wirobrajan terbagi menjadi 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Patangpuluhan, Kelurahan Wirobrajan, dan Kelurahan Pakuncen. Kemantren Wirobrajan memiliki Dermatib GISA berjumlah 13 orang yang terbagi menjadi 6 orang di Kelurahan Patangpuluhan, 2 orang di Kelurahan Wirobrajan, dan 5 orang di Kelurahan Pakuncen yang penugasannya tertuang dalam Surat Perintah Tugas Nomor : 800.1.11.1/7 tertanggal 02 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

Kader-kader yang terpilih tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Keberagaman latar belakang Dermatib GISA di Kemantren Wirobrajan, baik dari sisi pendidikan, pengalaman organisasi, usia, maupun kemampuan teknologi menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam

pelaksanaan tugas di lapangan. Di satu sisi, keberagaman ini menunjukkan inklusivitas dan representasi sosial dari berbagai kelompok masyarakat. Namun di sisi lain, perbedaan latar belakang ini memunculkan kesenjangan kapasitas antar kader, yang berdampak langsung terhadap efektivitas implementasi program GISA. Kader dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi dan terbiasa menggunakan teknologi cenderung lebih cepat memahami prosedur administrasi digital, mampu menyusun laporan dengan sistematis, serta aktif menggunakan media sosial untuk edukasi masyarakat. Sebaliknya, kader dengan latar belakang pendidikan yang terbatas atau tidak memiliki pengalaman organisasi sebelumnya sering mengalami kesulitan dalam memahami alur pelayanan, pengoperasian aplikasi JSS atau IKD, serta menyusun laporan tugas secara lengkap dan tepat waktu.

Oleh karena pembentukan Dermatib GISA merupakan salah satu kebijakan strategis yang diharapkan dapat membantu menyukseskan program GISA dari tingkat wilayah, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai peran kader masyarakat tertib dalam implementasi kebijakan GISA di Kemandren Wirobrajan Kota Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana peneliti menggambarkan dan meringkas berbagai situasi serta kondisi atau fenomena yang menjadi objek penelitian (Sugiyono, 2009), penelitian dilaksanakan di wilayah Kemandren Wirobrajan. Data utama yang digunakan bersumber dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Wawancara adalah teknik mengumpulkan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara peneliti dengan sumber data (informan). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Dalam penelitian ini komunikasi dilakukan secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka artinya peneliti berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian dan peneliti mencatat jawaban dari informan.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Teknik ini bertujuan untuk memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau informasi yang relevan dan penting terkait dengan topik penelitian. Dalam teknik *purposive*, peneliti secara sengaja memilih individu atau kelompok yang dapat memberikan data yang kaya dan mendalam yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Informan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1) Dermatib GISA

Dermatib GISA adalah pihak yang langsung terlibat dalam pelaksanaan kegiatan gerakan GISA di lapangan. Mereka adalah ujung tombak dalam menyosialisasikan pentingnya administrasi kependudukan kepada masyarakat. Sebagai informan utama, kader ini dapat memberikan informasi mengenai aktivitas sehari-hari mereka dalam mengedukasi masyarakat, tantangan yang mereka hadapi, serta strategi yang mereka gunakan dalam meningkatkan kesadaran administrasi kependudukan.

2) Pejabat atau staff Dindukcapil Kota Yogyakarta

Pejabat atau staf di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berperan dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi program administrasi kependudukan. Mereka memiliki wawasan tentang kebijakan, pelaksanaan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi program GISA. Mereka juga dapat memberikan informasi tentang hubungan antara Dermatib GISA dan pemerintah daerah dalam menyukseskan program ini.

3) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Patangpuluhan, Kelurahan Wirobrajan, dan Kelurahan Pakuncen

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah orang yang bertanggung jawab untuk

mengkoordinasi, memonitor dan melakukan evaluasi kinerja Dermatib GISA di tingkat kelurahan.

4) Kepala Jawatan Umum Kemantrien Wirobrajan

Kepala Jawatan Umum adalah orang yang bertanggungjawab untuk mengkoordinasi, memonitor dan melakukan evaluasi kinerja Dermatib GISA di tingkat kemantrien. Mereka dapat memberikan wawasan lebih tentang strategi dan evaluasi atas kinerja Dermatib GISA, serta bagaimana kader dilibatkan dalam setiap kegiatan administrasi kependudukan yang dilakukan kemantrien.

Analisa data yang digunakan yaitu Analisa data Tematik yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kata-kata kunci, merumuskan kategori data hingga muncul tema-tema dalam suatu fenomena (Djuhaeni, Dkk, 2010). Metode ini sering digunakan untuk memahami makna dibalik data yang dikumpulkan melalui wawancara, diskusi kelompok terfokus, atau survei terbuka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dermatib GISA

Personil Kader Masyarakat Tertib GISA dipilih melalui musyawarah kampung dan diajukan oleh kelurahan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kardi selaku Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Pakuncen, beliau menjelaskan bahwa nama-nama kader yang diserahkan ke Dukcapil Kota Yogyakarta berdasarkan pilihan warga sendiri setelah melalui musyawarah, namun ketika tidak ada nama yang diserahkan maka kader dipilih langsung oleh Kelurahan (Hasil wawancara pada hari Rabu, 12 Februari 2025 pada pukul 10.00 WIB). Peran Dermatib GISA dalam pelayanan administrasi kependudukan yaitu sebagai :

1. Pelopor

Para kader menjadi contoh dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah. Salah satu syarat menjadi kader masyarakat tertib adalah kader harus memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil yang lengkap seperti KTP, KK, Akte Kelahiran, dan KIA bagi yang sudah mempunyai anak. Selain itu, kader juga sudah menggunakan aplikasi Jogja Smart Service (JSS) dan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hal tersebut juga sekaligus untuk membuktikan bahwa para kader memiliki kesadaran yang tinggi dalam tertib administrasi kependudukan.

2. Motivator dan Edukator

Dermatib GISA berperan sebagai motivator dan edukator dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah. Motivator menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti orang yang menyebabkan timbulnya motivasi pada orang lain untuk melakukan sesuatu, sedangkan edukator menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seseorang yang berperan menyampaikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain. Dermatib GISA harus mendorong dan menggerakkan masyarakat agar tertib dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Dermatib GISA juga berperan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki dokumen kependudukan secara lengkap melalui berbagai media seperti pertemuan RT/RW, grup WhatsApp, dan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan tiktok.

3. Fasilitator

Fasilitator adalah pemandu proses, seseorang yang membuat sebuah proses menjadi lebih mudah atau lebih yakin untuk menggunakannya. Dermatib GISA harus selalu proaktif dan sigap membantu masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP, KIA, KK, akta

kelahiran, dan kematian.

4. Administrator

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), administrasi dalam arti luas adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dalam penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Sehingga dapat diartikan administrator ialah orang yang bertugas untuk mengurus hal-hal administrasi atau pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini kader berperan sebagai pelaksana kegiatan yang membantu pengurusan dokumen kependudukan warga secara administratif serta membuat laporan ketugasannya untuk dilaporkan kepada Kelurahan setiap bulannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Runti Astiwi selaku Kepala Jawatan Umum Kemandren Wirobrajan, beliau menyampaikan bahwa tugas dan fungsi Dermatib GISA sudah tertuang dalam Surat Perintah Tugas Nomor : 800.1.11.1/7 tertanggal 02 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, dan tugas dari kemandren adalah memastikan bahwa Dermatib GISA bertugas sesuai tupoksinya. Maka dari itu, kemandren mengadakan rapat monev mengundang perangkat kelurahan dan seluruh Kader Masyarakat Tertib Wirobrajan dua kali dalam setahun. Hal tersebut dilakukan untuk mengevaluasi serta mencari solusi jika Dermatib menemukan hambatan didalam ketugasannya (Hasil wawancara pada hari Senin, 10 Maret 2025 pada pukul 08.30 WIB).

Strategi Pelaksanaan Tugas

Dermatib GISA memiliki peran strategis sebagai fasilitator dan penggerak masyarakat dalam meningkatkan kesadaran pentingnya administrasi kependudukan. Dalam menjalankan tugasnya, Dermatib GISA perlu menggunakan pendekatan yang efektif dan adaptif sesuai kondisi sosial masyarakat. Dari hasil wawancara 13 kader masyarakat tertib di Kemandren Wirobrajan, bahwa terdapat tiga pendekatan utama yang digunakan Dermatib GISA dalam menjalankan tugasnya :

1. Strategi Komunikasi Intensif

Kader membangun komunikasi yang intensif, baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (digital). Komunikasi langsung (offline) dilakukan melalui kunjungan rumah, sosialisasi di forum RT/RW, PKK, dan karang taruna. Sedangkan komunikasi tidak langsung (online) dilakukan dengan memanfaatkan WhatsApp group warga, Facebook, dan media sosial lokal untuk menyampaikan segala informasi berkaitan dengan pengurusan dokumen kependudukan.

2. Strategi Jemput Bola (Proaktif)

Kader tidak menunggu masyarakat datang, tetapi aktif mendatangi mereka, terutama kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga dengan keterbatasan akses informasi atau teknologi.

3. Strategi Kolaboratif

Kader berjejaring dengan perangkat RT/RW, kelurahan, kemandren, dan Dukcapil untuk mempercepat proses dan menyinkronkan informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Kusno selaku Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Wirobrajan, beliau menjelaskan bahwa strategi pelaksanaan tugas diserahkan sepenuhnya kepada para kader. Kelurahan memberikan support memberikan update informasi dari Dukcapil Kota Yogyakarta berupa data-data warga yang belum memiliki dokumen kependudukan secara lengkap (Hasil wawancara pada hari Senin, 17 Maret 2025 pada pukul 08.00 WIB).

Faktor Pendukung Peran Dermatib GISA

Faktor pendukung dari adanya peranan Kader Masyarakat Tertib GISA di Kemandren Wirobrajan diantaranya yaitu :

1. Dukungan, komunikasi, dan koordinasi dengan kelurahan, kemandren, dan Dukcapil berjalan dengan baik.
2. Akses pengurusan dokumen ke Dukcapil lebih mudah dan lebih cepat melalui akses khusus kader.
3. Adanya insentif meskipun jumlahnya kurang memadai
4. Adanya bimbingan teknis dari Dukcapil Kota Yogyakarta meskipun hanya setahun sekali.
5. Adanya mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) di kantor Kemandren Wirobrajan yang memudahkan kader dan warga khususnya di wilayah Wirobrajan untuk mencetak dokumen kependudukan secara mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Trisminingsih selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, beliau menyampaikan bahwa Kader Masyarakat Tertib sudah dibentuk dari tahun 2018 tidak lama setelah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tanggal 7 Februari 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dikeluarkan. Pembentukan Kader Masyarakat Tertib GISA sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dukcapil dalam menyukseskan GISA. Dari awal pembentukan hingga sekarang, Dukcapil Kota Yogyakarta selalu mengevaluasi dan melakukan perbaikan-perbaikan agar peran Dermatib GISA bisa lebih efektif dan efisien. Dulu yang masih serba offline dan harus tatap muka, hingga sekarang yang serba online, mau tidak mau kader juga harus bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Untuk memotivasi agar Dermatib lebih semangat dalam menjalankan tupoksinya, maka diberikan insentif Rp. 10.000,00 per dokumen yang diajukan. Dukcapil Kota Yogyakarta juga melakukan pemasangan mesin ADM di sejumlah titik yang harapannya bisa merata dan dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat yang akan melakukan pencetakan dokumen kependudukan secara mandiri, salah satu nya yaitu berada di dalam kantor pelayanan Kemandren Wirobrajan. Penambahan mesin ADM di Kemandren Wirobrajan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2024 dengan harapan bisa dimanfaatkan dan memudahkan kader dan warga khususnya di wilayah Wirobrajan dalam melakukan pencetakan dokumen kependudukan secara mandiri (Hasil wawancara pada hari Senin, 05 Mei 2025 pada pukul 16.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mardiyanto selaku Koordinator Kader Masyarakat Tertib Kelurahan Wirobrajan, beliau menyampaikan bahwa dukungan kelurahan dan kemandren sudah sangat baik, ditambah dengan penambahan mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) di kantor pelayanan Kemandren Wirobrajan memudahkan ketugasannya yang sebelumnya harus datang ke Mall Pelayanan Publik Balaikota jika mau mencetak dokumen kependudukan, sekarang tidak perlu jauh-jauh. Selain itu, akses pengurusan dokumen kependudukan melalui Dukcapil juga sangat mudah karena Dermatib GISA diberikan perhatian khusus (Hasil wawancara pada hari Senin, 21 April 2025 pada pukul 15.00 WIB).

Faktor Penghambat Peran Dermatib GISA

Faktor penghambat dari adanya peranan Kader Masyarakat Tertib GISA di Kemandren Wirobrajan diantaranya yaitu :

1. Ketidaklengkapan data dari Pemohon

Salah satu kendala utama yang sering dihadapi Dermatib GISA adalah permohonan administrasi kependudukan yang tidak disertai dengan data atau dokumen lengkap. Dampaknya adalah proses pengajuan dokumen menjadi tertunda atau ditolak, Kader harus bolak-balik menghubungi pemohon untuk melengkapi berkas, yang menyita waktu dan tenaga.

2. Kurangnya fasilitas operasional

Dermatib GISA bekerja dengan sumber daya pribadi, seperti HP, printer, atau kuota internet. Padahal, mereka membutuhkan sarana ini untuk mengirimkan dokumen secara digital ke Dukcapil dan mencetak formulir atau mengakses aplikasi kependudukan secara online. Akibatnya pelayanan menjadi lambat dan tidak efisien, Kader sering harus menanggung biaya operasional sendiri, yang seharusnya bisa disediakan oleh lembaga yang menaunginya.

3. Minimnya pelatihan teknis

Kader Masyarakat Tertib GISA membutuhkan pemahaman teknis terkait prosedur pengurusan dokumen adminduk, penggunaan aplikasi JSS dan sistem layanan daring lainnya. Namun, banyak kader belum mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) secara memadai dan berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan masih terjadi kesalahan input data atau prosedur, dan Kader merasa tidak percaya diri saat memberikan layanan atau informasi kepada masyarakat.

4. Keterbatasan Kemampuan Teknologi

Sebagian besar kader menggunakan perangkat pribadi seperti ponsel atau laptop yang tidak selalu dalam kondisi optimal (misalnya: memori penuh, software usang, atau perangkat rusak). Selain itu, beberapa kader mungkin memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi secara efektif. Hal ini menyebabkan Kader kesulitan mengakses platform digital secara cepat. Adanya gangguan teknis memperlambat komunikasi antara kader, masyarakat, kelurahan, kemanduren dan Dukcapil.

5. Rendahnya Apresiasi Terhadap Beban Tugas

Dermatib GISA memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan administrasi kependudukan. Namun, jumlah insentif yang diberikan tidak sebanding dengan volume dan kompleksitas pekerjaan yang dijalankan. Insentif merupakan salah satu bentuk motivasi eksternal yang mendorong seseorang untuk melaksanakan tugas secara konsisten dan optimal. Dermatib GISA hanya menerima insentif sebesar Rp. 10.000,00 setiap dokumen warga yang diajukan dan diberikan oleh Dukcapil Kota Yogyakarta melalui klaim dengan mengirimkan laporan bulanan yang ditandatangani oleh Lurah. Berdasarkan hasil wawancara, insentif yang diterima tidak mencukupi kebutuhan dasar operasional maupun pribadi. Hal ini bisa memicu kader menjadi cenderung kurang aktif dalam menjangkau warga secara proaktif, menunda pelaporan atau pendataan karena merasa tidak dihargai, hanya bekerja saat diminta, bukan secara inisiatif. Dengan insentif yang minim, kader kesulitan membiayai kebutuhan operasional dasar, seperti : pembelian kuota internet untuk pelaporan dan komunikasi digital, transportasi untuk mendatangi rumah warga atau kelurahan, dan alat tulis dan perlengkapan administrasi lainnya. Akibatnya, kader harus mengandalkan dana pribadi, yang tidak semua mampu lakukan secara berkelanjutan.

6. Beberapa Kader merangkap sebagai ketua RT/RW

Dalam beberapa kasus di lapangan, terdapat Dermatib GISA yang merangkap jabatan sebagai Ketua RT atau Ketua RW. Meskipun memiliki posisi strategis dalam struktur masyarakat, perangkapan tugas ini justru menimbulkan hambatan dalam menjalankan fungsi Dermatib GISA

secara optimal. Ketua RT/RW memiliki tanggung jawab administratif dan sosial yang luas, seperti mengelola kegiatan kemasyarakatan dan keamanan lingkungan, menyusun laporan bulanan kepada kelurahan, dan menangani konflik atau kebutuhan sosial warga. Ketika tugas-tugas tersebut digabung dengan tanggung jawab sebagai Dermatib GISA yang juga menuntut waktu untuk sosialisasi, penginputan data, dan pendampingan pengurusan dokumen, maka terjadi overload beban kerja. Menurut teori peranan (Narwoko & Bagong, 2010), seseorang yang memegang dua peran sosial sekaligus bisa mengalami konflik peran. Dalam hal ini peran sebagai Ketua RT/RW menuntut netralitas dalam pelayanan publik, sementara peran kader GISA lebih spesifik pada fasilitasi dokumen kependudukan. Ketika dua peran tersebut beririsan secara waktu, energi, dan fokus, maka salah satu peran akan dijalankan secara tidak maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Pitoyo selaku Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Patangpuluhan, beliau menjelaskan bahwa Dermatib GISA di kelurahan Patangpuluhan tidak semuanya aktif karena beberapa kader menjabat juga sebagai ketua RT atau ketua RW sehingga menyebabkan ketugasan GISA tidak berjalan dengan optimal (Hasil wawancara pada hari Senin, 21 April 2025 pada pukul 09.00 WIB).

7. Warga mempunyai KK Wirobrajan namun tidak berdomisili di Wirobrajan

Dalam beberapa kasus di lapangan, masih ditemukan warga yang terdata sebagai warga Wirobrajan, namun setelah didatangi para kader sudah tidak berdomisili di Wirobrajan dengan berbagai alasan seperti bekerja di luar kota, karena menikah, karena ingin menyekolahkan anaknya di kota, sudah pindah rumah namun tidak mengurus perpindahan penduduk, dan alasan lainnya. Hal ini tentu saja menimbulkan sejumlah kendala dalam ketugasan Dermatib GISA. Secara teknis, warga tersebut tetap tercatat sebagai bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Wirobrajan, sehingga menjadi tanggung jawab kader dalam pendataan dan pemutakhiran informasi kependudukan. Namun dalam praktiknya, kondisi ini menyebabkan distorsi data dan hambatan di lapangan.

Analisis Implementasi Kebijakan GISA Berdasarkan Teori Edward III

George C. Edward III (1980) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan yang efektif ditentukan oleh empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap implementator, dan struktur birokrasi. Berikut analisis berdasarkan masing-masing aspek:

1. Komunikasi

Komunikasi yang baik antara Dermatib GISA dengan kelurahan, kecamatan, dan Dukcapil menjadi salah satu faktor pendukung utama keberhasilan implementasi GISA di Kecamatan Wirobrajan. Koordinasi yang terbangun dengan lancar memungkinkan kader mendapatkan akses khusus ke Dukcapil serta menyampaikan laporan bulanan secara tertib. Namun, hambatan juga muncul, terutama ketika pemohon tidak memberikan data yang lengkap. Kurangnya literasi administrasi pada masyarakat menyebabkan kader harus melakukan komunikasi berulang kali, yang menyita waktu dan energi. Komunikasi digital pun tidak selalu berjalan mulus karena keterbatasan perangkat dan kuota internet. Komunikasi vertikal cukup baik, namun komunikasi horizontal antara kader dan masyarakat masih terhambat oleh faktor teknis dan edukatif.

2. Sumber Daya

Edward III menekankan bahwa tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan efektif. Dalam hal ini, Dermatib GISA mengalami keterbatasan serius antara lain :

- Fasilitas operasional minim, seperti tidak tersedianya perangkat kerja resmi, printer, atau dana kuota internet.

- b. Perangkat teknologi milik pribadi yang sering bermasalah (memori penuh, software usang, tidak terhubung jaringan).
- c. Minimnya pelatihan teknis, hanya dilakukan setahun sekali, sehingga pemahaman tentang sistem layanan online seperti JSS dan IKD masih rendah.

Insetif yang hanya Rp 10.000 per dokumen tidak cukup untuk menutup biaya operasional sehari-hari, apalagi jika harus melakukan pelayanan secara aktif dan menjangkau rumah warga. Ketersediaan sumber daya menjadi faktor paling kritis dalam menghambat efektivitas implementasi. Hal tersebut juga dikeluhkan oleh Ibu Ratri selaku koordinator Dermatib GISA kelurahan Pakuncen dalam wawancara. Beliau menyampaikan bahwa insetif tidak menutup biaya operasional dan biaya transport, apalagi jika pemohon adalah kelompok masyarakat rentan yang harus didatangi rumahnya (Hasil wawancara pada hari Senin, 21 April 2025 pada pukul 16.00 WIB).

3. Disposisi (Sikap dan Komitmen Pelaksana)

Sebagian besar Dermatib GISA memiliki komitmen tinggi dan semangat pelayanan. Namun, insetif yang rendah secara tidak langsung menurunkan motivasi kerja. Mereka menjadi lebih reaktif (bekerja saat diminta), bukan proaktif (menjangkau warga secara mandiri). Kader juga menghadapi beban ganda jika merangkap sebagai Ketua RT atau RW, yang menimbulkan konflik peran. Peran sebagai pemimpin wilayah menuntut fokus pada banyak kegiatan sosial, sementara sebagai Dermatib GISA dituntut fokus pada pengurusan dokumen kependudukan. Disposisi awalnya positif, namun tergerus oleh beban kerja yang tinggi dan apresiasi yang minim, menurunkan efektivitas jangka panjang.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang mendukung ditunjukkan melalui adanya jalur koordinasi resmi antara kader, kelurahan, kemanduren dan Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta. Koordinasi antara Dermatib GISA dengan kelurahan berjalan dengan baik karena kader dipersilahkan untuk berkantor atau datang setiap hari di kelurahan sehingga terjalin komunikasi yang baik karena bertemu hamper setiap hari. Informasi terkait administrasi kependudukan dari instansi vertikal juga tersampaikan dengan baik kepada Dermatib GISA. Jalur koordinasi dengan kemanduren berjalan dengan baik karena kemanduren selalu melibatkan Dermatib GISA ketika ada program terkait administrasi kependudukan baik program dari kemanduren sendiri maupun program dari Dukcapil Kota Yogyakarta yang meminjam lokasi di Kantor Kemanduren Wirobrajan. Agar koordinasi tetap berjalan dengan baik, kemanduren juga mengadakan FGD (*Focus Group Discussion*) setahun diadakan 2 kali untuk evaluasi. Sedangkan hubungan kader dengan Dukcapil Kota Yogyakarta yaitu kemudahan akses pengurusan dokumen kependudukan melalui jalur khusus ke petugas. Namun demikian, hambatan tetap terjadi karena struktur ini tidak disertai sistem pendukung teknologi atau logistik yang memadai. Kader harus klaim insetif secara manual dengan mengirimkan laporan yang di tandatangani Lurah, tidak bisa secara otomatis masuk ke rekening setiap bulannya. Hambatan lain yaitu kurangnya pembagian kerja yang jelas antara tugas sebagai RT/RW dan Dermatib GISA. Hal ini berpotensi menyebabkan tumpang tindih peran dan penurunan kualitas pelayanan. Struktur birokrasi cukup terorganisir, tetapi tidak cukup fleksibel dan responsif terhadap beban ganda kader.

Analisis Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengangkat tema serupa mengenai pelaksanaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), antara lain:

1. Almizan (2020)

Studi ini menyoroti implementasi Instruksi Mendagri No. 470/837/SJ di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Fokus penelitian lebih pada kebijakan makro dan keterlibatan birokrasi dalam implementasi GISA. Penekanan berada pada rendahnya kesadaran masyarakat serta lemahnya struktur koordinasi antar instansi pemerintah.

2. Fadhil & Ilham (2019)

Penelitian ini membahas peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung dalam mengoptimalkan pelayanan GISA. Penekanan berada pada strategi kelembagaan dan inovasi birokrasi, bukan pada aktor masyarakat seperti kader.

3. Fauzan et al. (2022)

Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas program GISA di Kota Sukabumi, menilai bagaimana program tersebut dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan efektivitas. Kader hanya disebut secara umum, tanpa penjabaran mendalam terhadap tugas dan dinamika lapangannya.

4. Romadhona & Nawangsari (2023)

Mengulas strategi pelaksanaan GISA melalui inovasi lokal *Kalimasada* di Kelurahan Margorejo, Surabaya. Fokusnya adalah inovasi pelayanan digital dari sisi pemerintah, bukan partisipasi kader masyarakat.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang juga mengangkat tema serupa mengenai pelaksanaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di atas, penelitian ini memiliki nilai kebaruan yang jelas dan signifikan dibandingkan studi sebelumnya, antara lain :

1. Tidak seperti studi lain yang fokus pada aspek kelembagaan atau kebijakan tingkat makro, penelitian ini secara khusus mengeksplorasi peran, strategi, hambatan, dan kapasitas Dermatib GISA sebagai aktor lapangan yang menjembatani masyarakat dengan sistem administrasi negara.
2. Penelitian dilakukan secara mendalam di Kemandren Wirobrajan dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung terhadap 13 kader. Ini menjadikan penelitian sangat kontekstual dan aplikatif pada realitas sosial setempat.
3. Penelitian ini menggabungkan data empiris dengan teori implementasi kebijakan, sehingga memberikan kerangka evaluatif yang kuat terhadap efektivitas pelaksanaan GISA di tingkat masyarakat.
4. Salah satu temuan unik dari penelitian ini adalah dampak dari keberagaman latar belakang kader terhadap kualitas pelayanan. Ini belum banyak dibahas secara eksplisit dalam studi terdahulu.
5. Penelitian ini juga mengangkat dua isu penting yang jarang disorot sebelumnya yaitu Dermatib GISA yang merangkap sebagai ketua RT/RW dan mengalami konflik peran dan adanya warga dengan KK Wirobrajan tetapi tidak berdomisili di wilayah tersebut, yang menimbulkan beban administratif tambahan bagi kader.

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk perumusan kebijakan penguatan kader dan pengembangan model pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah Dermatib GISA di Kemandren Wirobrajan memainkan peran penting dalam mendukung kebijakan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA). Mereka berperan sebagai pelopor, motivator, edukator, fasilitator, dan administrator dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan. Hal ini sudah sesuai

dengan tugas dan fungsi Dermatib GISA dalam ketugasannya yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas No : 800.1.11.1/7. Strategi pelaksanaan tugas yang dilakukan melalui pendekatan komunikasi intensif, jemput bola, dan kolaboratif menunjukkan komitmen tinggi dari para kader. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan peran kader masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan utama yang ditemukan meliputi ketidaklengkapan data pemohon, keterbatasan fasilitas operasional, minimnya pelatihan teknis, keterbatasan kemampuan teknologi, rendahnya insentif, serta perangkapan jabatan. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III, kelemahan paling mencolok terdapat pada aspek sumber daya dan disposisi pelaksana.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Program Studi Magister Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat "APMD" Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk melaksanakan penelitian ini. Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan oleh seluruh dosen dan staf yang telah membantu penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kemanduren Wirobrajan atas akses yang diberikan dalam memperoleh data dan informasi terkait implementasi kebijakan GISA melalui peran Kader Masyarakat Tertib serta dukungan fasilitas yang disediakan sangat membantu kelancaran penulisan artikel ini.

Tak lupa, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak di Kader Masyarakat Tertib, kepada perangkat kelurahan dan kemanduren, serta Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, yang telah memberikan informasi serta mendukung pelaksanaan penelitian ini. Koordinasi dan Kerjasama yang terjalin baik antara Kader Masyarakat Tertib dengan instansi pemerintah dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi yang tak ternilai dalam penyusunan karya ilmiah ini. Semoga kerja sama yang telah terjalin dapat terus berkesinambungan sehingga program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Agustini F. Analisis Pengetahuan Kader Tentang Peran Dan Fungsi Kader Di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016. *J Kesehatan Bidkemas*. 2017;8(2):35–42.
2. Agustino L. Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: CV Alfabeta; 2006.
3. Almizan M. Implementasi Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 470/837/SJ Tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Studi pada Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang) [Tesis]. Medan: Universitas Medan Area; 2020.
4. Atikasari H, Karsinah K. Urgensi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) guna mewujudkan birokrasi ideal. *J Bina Desa*. 2022;4(1):149–156.
5. Berman E. The study of bureaucratic politics. *Public Policy*. 1978;26(3):1–29.
6. Candra A, Suprayogo T, Sinaga JBB. Efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengoptimalkan pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. *Ensiklopedia of Journal*. 2014;6(2):36–41.
7. Cresswell JW. Pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2017.
8. Davis K. Perilaku dalam organisasi. Jakarta: Erlangga; 1985. p. 179.
9. Fadhil M, Ilham M. Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengoptimalkan pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *J Registratie*. 2019;1(1):1–20.

10. Fauzan I, Rachmawati I, Purwanti D. Akuntabilitas Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Kota Sukabumi. *Inov Penelit.* 2022;3(2):4785–4794.
11. Hill M, Hupe P. *Implementing public policy: governance in theory and practice*. London: Sage Publications; 2002.
12. Kementerian Dalam Negeri RI. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri; 2018.
13. Narwoko JD, Suyanto B. *Sosiologi: teks pengantar dan terapan*. Jakarta: Kencana; 2010. p. 160.
14. Pressman JL, Wildavsky A. *Implementation: how great expectations in Washington are dashed in Oakland*. Berkeley: University of California Press; 1973.
15. Romadhona LD, Nawangsari ER. Strategi Gerakan Indonesia Sadar Adminduk melalui inovasi Kalimasada di Kelurahan Margorejo Kota Surabaya. *J Ilm Wahana Pendidik.* 2023;9(September):461–469.
16. Sagita D, Herawati AR, Subowo A. Kualitas pelayanan akta kematian berbasis aplikasi DESA GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk) di Disdukcapil Kabupaten Semarang. *Sustainability (Switzerland)*. 2019;11(1):1–14.
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 232.
18. Van Meter DS, Van Horn CE. The policy implementation process: a conceptual framework. *Adm Soc.* 1975;6(4):445–488.
19. Wulansari AD. Implementasi Gerakan Indonesia Sadar Adminduk melalui program inovasi oleh Disdukcapil Kota Surabaya. *J Inov Penelit.* 2023;4(1):88–100.